

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Sebelum berlakunya UUPK praktis hanya sedikit pengertian konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata konsumen disebut dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan, tanpa disertai penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy dengan mengatakan, “*consumers by definition include us all*”.¹⁰

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa; (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).¹¹ Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, “Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)” dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit: Binacipta, Bandung, tahun 1986, hlm. 57.

¹¹ E. H. Hondius, “Konsumentenrecht”, 1976 dalam Shidharta. Hlm. 2.

sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya, pengertian konsumen dapat terdiri dari 3 pengertian, yaitu:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memperdagangkan/komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha public (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti *supplier*, distributor atau pedagang.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke person*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

2. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 1 butir 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pelaku Usaha adalah: *“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Definisi Pelaku Usaha yang diberikan oleh Pasal 1 butir 3 UUPK tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku usaha menurut UUPK juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perorangan yang bukan kewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

3. Pengertian Sengketa Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan “sengketa konsumen”, namun bukan berarti tidak ada penjelasan. Kata-kata “sengketa konsumen” dijumpai pada beberapa bagian Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Pasal 1 butir 11 UUPK jo. Bab XI UUPK, penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan institusi administrasi negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Batasan BPSK pada pasal 1 butir 11 UUPK menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “sengketa konsumen” yaitu: sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, sengketa sesama pelaku usaha bukanlah sengketa konsumen.
- b. Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab IX Penyelesaian Sengketa. Pada bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 48 UUPK.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹²

Pengertian Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹³

2. Asas Dalam Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas

¹² Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9

¹³ Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”. Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 6-7.

yang relevan dalam pembangunan nasional. Penjelasan dari kelima asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha/konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

C. Tinjauan Umum Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)

1. Dasar Hukum BPSK

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yaitu "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan". Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana dikehendaki undang-undang, merupakan pilihan yang tepat untuk mengedepankan penyelesaian perdamaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Dikatakan cepat karena menurut pasal 55 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah "Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima".¹⁴

¹⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang : UINMALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2011, Hal 65.

2. Kelembagaan BPSK

BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang selanjutnya disebut dengan BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. BPSK disebut juga institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparat pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

BPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan BPSK. BPSK merupakan sebuah lembaga yang pembentukannya diamanatkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun baru dapat dibentuk secara de jure dengan keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan penyelesaian Sengketa Konsumen dan secara de facto BPSK baru terbentuk pada tahun 2002

bersamaan dengan dilantiknya anggota BPSK berdasarkan Kepmenperindag RI. No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya Kota Malang, Dan Kota Makasar.¹⁵

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) meliputi arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Di dalam penyelesaian konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Tetapi pada prakteknya mayoritas menggunakan arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh suatu majelis yang bertindak sebagai arbiter. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitor yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih

¹⁵ Kelik Wardiono, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*, Surakarta : Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, Hal 346.

arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Setelah dipilih ketua majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya hukum yang di gunakan dalam menyelesaikan sengketa.¹⁶

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dapat melakukan kaukus, yaitu proses penyelesaian sengketa dimana dalam hal-hal tertentu para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha masing-masing dimediasikan secara terpisah.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Merujuk ketentuan Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/2001 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

¹⁶ *Ibid.* hal 78

Dalam Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Artinya, proses penyelesaian sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara bertahap atau berjenjang melainkan para pihak dapat bersepakat memilih bentuk penyelesaian yang mana yang akan digunakan.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Ketika para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian secara mediasi, maka penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Apabila para pihak sepakat memilih secara konsiliasi maupun mediasi, keduanya harus dilakukan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK. Lain halnya ketika para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian secara arbitrase, maka penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Ketentuan mengenai pihak yang melakukan penyelesaian ini diatur dalam Pasal 5 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.¹⁷

¹⁷ Lihat Pasal 5 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK, yang jumlah anggotanya ganjil dan sedikitdikitnya 3 yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Adapun yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah tidak ada upaya banding dan kazasi. Sedangkan mengikat memiliki makna bahwa putusan akan mengikat para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan majelis dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK (Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK).

Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Dalam Pasal 2 Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK ditegaskan bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan ini dapat diajukan baik oleh pelaku

usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.

4. Tata Cara Persidangan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam rangka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001¹⁸ dimana konsumen dapat mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing).

Setelah syarat permohonan yang diajukan secara tertulis lengkap dan benar,¹⁸ serta diterima oleh BPSK kemudian dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

¹⁸ Lihat Pasal 16 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Apabila hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan dimana diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 36 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan. Sebagaimana proses penyelesaian sengketa yang menjadi pilihan para pihak untuk digunakan yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, maka masing-masing dari bentuk penyelesaian tersebut memiliki karakteristik dan tata cara tersendiri.

Bentuk penyelesaian yang pertama yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mengenai tata cara persidangan secara konsiliasi diatur dalam Pasal 28 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.¹⁹

Bentuk penyelesaian sengketa yang kedua yaitu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan

¹⁹ Lihat Pasal 28 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mengenai tata cara persidangan secara konsiliasi diatur dalam Pasal 30 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis mempunyai tugas:

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan.
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Bentuk penyelesaian sengketa yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Mengenai tata cara persidangan secara konsiliasi diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.²⁰

Pada hari persidangan pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan ketika tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan

²⁰ Lihat Pasal 32 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usah. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang persengketakan.²¹

Pada persidangan tersebut, sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan. Apabila gugatan dicabut oleh konsumen, maka dalam persidangan, pertama majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Dalam hal pelaku usaha dan konsumen tidak hadir pada hari persidangan pertama majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak hari persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat BPSK. Apabila pada persidangan kedua, konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya bila pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

²¹ Lihat Pasal 34 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan dibacakan. Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.

Selain itu, pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan, setelah batas waktu 7 hari dianggap

menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui.²² Namun, bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan BPSK dapat mengajukan permohonan keberatan agar dapat dilakukan pembatalan terhadap putusan BPSK tersebut oleh Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.

D. Tinjauan Umum Kompetensi/Kewenangan Pengadilan

1. Pengertian Umum Kompetensi/Kewenangan

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan criteria yang diajukan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari arti definisi kompetensi ini, maka banyak mengandung beberapamakna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

²² Lihat pasal 35 sampai pasal 41 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

- a. Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- b. Hubungan kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).
- c. Criteria (*criterion referenced*) yang diajukan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksi seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar, misalnya criteria volume penjualan yang mampu dihasilkan seseorang salesman sebesar 1.000 buah/bulan atau manajer keuangan dapat mendapatkan keuntungan 1 miliar/tahun.

Kemudian, ia mengatakan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.²³

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.²⁴

Spencer menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau

²³ Moeheriono, Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5

²⁴ Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 324.

berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
- b. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- c. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
- d. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
- e. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.

2. Kewenangan / Kompetensi Absolut dan Relatif BPSK

a. Kompetensi Absolut BPSK

Pasal 47 UUPK menjelaskan, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.²⁶ Untuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan, pemerintah membentuk suatu badan baru yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 325-326

²⁶ Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK, yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumendi luar pengadilan, tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan.²⁷

Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/ produsen yang pada umumnya meliputi jumlah yang kecil dan bersifat sederhana. Jika sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan, maka justru akan merugikan konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung konsumen lebih besar daripada nilai kerugiannya.

Bagi penyelesaian sengketa untuk kasus yang sederhana dan berskala kecil, pengadilan bukanlah pilihan yang efektif. Disamping biaya perkara yang harus dikeluarkan cukup besar, proses penyelesaiannya memakai hukum acara yang formal dan memerlukan waktu yang lama. Penyelesaian perkara di Pengadilan justru sering kali tidak memberikan keadilan atau kepuasan kepada para pihak yang bersengketa.

²⁷ Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

Meskipun BPSK bukan pengadilan lebih tepat disebut peradilan semu tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian konsumen secara patut, tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK.²⁸

Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam pasal 52 UUPK jo. Kepmemperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

- a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

²⁸ Bab IV Pasal 8-17 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

- i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

b. Kompetensi Relatif BPSK

Setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang datang mengadu kepada BPSK harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK yang menangani pengaduan konsumen. Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen.²⁹

Membaca pasal-pasal dalam UUPK yang mengatur gugatan yang berkaitan dengan sengketa konsumen, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen yang menjadi penggugat adalah konsumen dan tergugat adalah pelaku usaha. Artinya gugatan/permohonan diajukan ke BPSK di tempat kedudukan penggugat (konsumen), yang mana hal tersebut dikuatkan dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹ Pasal 2 Keppres No 90 Tahun 2001

3. Kewenangan / Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Negeri

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.³⁰ Dengan memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Jadi dengan demikian, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen.³¹

Gugatan pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen melalui pengadilan negeri, dengan menggunakan instrument hukum acara perdata (konvensional), dilakukan oleh seseorang konsumen atau lebih atau ahli warisnya.³² Dalam hukum acara perdata konvensional dikenal siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan.

³⁰ Lihat Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

³¹ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat privat maupun publik. Untuk sengketa yang lebih menekankan pada kepastian hukum metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi. Tetapi jika menekankan pada membina hubungan baik terutama hubungan bisnis, metode penyelesaian yang tepat adalah konsiliasi atau mediasi.

³² Lihat Pasal 46 ayat (1) huruf a UUPK

Masuknya sengketa konsumen ke pengadilan negeri berdasarkan keaktifan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, dalam hal ini pelaku usaha atau konsumen. Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap pelaku usaha atas pelanggaran norma-norma UUPK. Sebaliknya, pelaku usaha tidak diperkenankan menggugat konsumen atau mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan merujuk pada pelanggaran konsumen atas norma-norma UUPK, kecuali menyangkut pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 UUPK:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika mengacu pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan konsumen para pihak yang telah berperkara di BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri

Gugatan diajukan melalui pengadilan negeri ditempat kedudukan konsumen. Dengan berlakunya UUPK, maka konsumen yang akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, tidak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, tetapi diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen sebagai penggugat.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

Apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK (Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK).

Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Dalam Pasal 2 Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK ditegaskan bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan ini dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.

Setelah proses pemeriksaan dianggap selesai dan apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).³³ yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

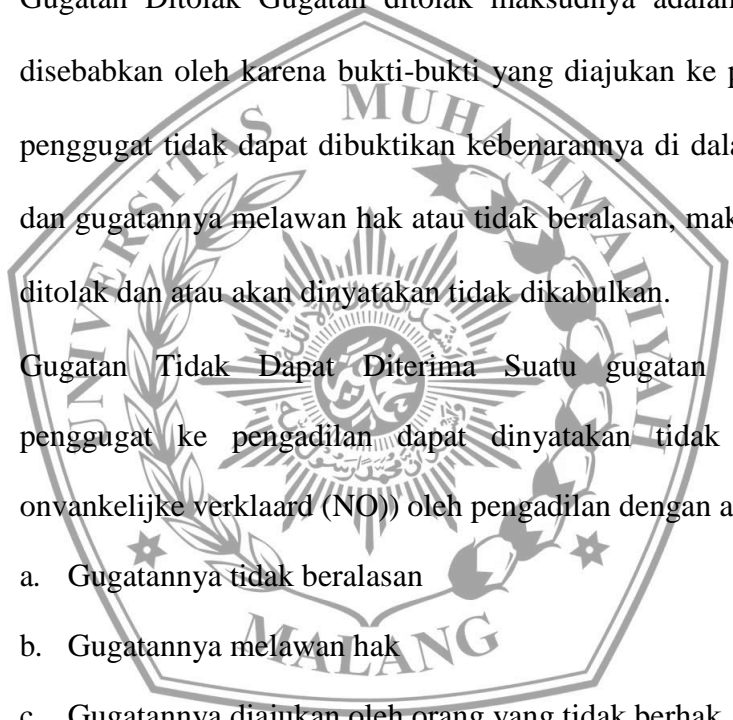
Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.³⁴ Putusan hakim menjadi tujuan akhir bagi para pihak yang bersengketa dimana dalam putusan hakim disebutkan secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sehingga memperoleh kepastian hukum.

Putusan akhir adalah tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.³⁵ Putusan akhir dalam suatu perkara dapat berupa :³⁶

³³ Hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia. Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2f2e1966dac/tentang-rv-hir-rbgab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005> diakses pada tanggal 6 September 2019 pada pukul 20.25 WIB

³⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 211.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 888.

- 
- a) Gugatan Dikabulkan Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya sebagian.
- b) Gugatan Ditolak Gugatan ditolak maksudnya adalah gugatan yang disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.
- c) Gugatan Tidak Dapat Diterima Suatu gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard (NO)) oleh pengadilan dengan alasan bahwa:
- Gugatannya tidak beralasan
 - Gugatannya melawan hak
 - Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada

³⁶ Sarwono, *Op. Cit.* Hlm. 222.

kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut.

- (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.³⁷

Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase dan APS permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Kemudian Pasal 72

³⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 86.

menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

